

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas menurut PERMENKES Tahun 2016 adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyatakan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Bentuk Perwujudan dari UU RI No 36 Tahun 2009 adalah penerapan UU RI No 40 Tahun 2004 yaitu adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial (Faisal, 2015). Tujuan dari BPJS yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya(UU RI, 2011).

Pemerintah menyelenggarakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional menunjuk fasilitas kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat BPJS. Adanya program ini diharapkan dapat meminimalisasi setiap biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk memperoleh pengobatan yang maksimal dan terjangkau (Faisal, 2015).

Fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama pada BPJS yaitu puskesmas yang setara dengan praktek dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus (Kemenkes RI, 2013).

Formularium nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN (Dirjen Binfar & Alkes, 2014). Manfaat formularium nasional salah satunya yaitu untuk pengendalian mutu dan untuk mengoptimalkan pelayanan pada pasien (Kemenkes RI, 2013)

Obat yang diresepkan harus sesuai dengan formularium nasional, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan instalasi farmasi. Apabila obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalogue*, maka pengadaan obat dapat dilakukan secara manual (Depkes RI, 2014)

Apabila formularium nasional tidak diterapkan dengan baik maka akan mempengaruhi mutu pelayanan dari instalasi farmasi dan pelayanan terhadap pasien menjadi tidak optimal. Resep yang tidak sesuai dengan formularium nasional menyebabkan adanya resep yang ditolak karena obat tersebut tidak tersedia dalam formularium nasional dan obat tidak termasuk dalam paket pengobatan. Sehingga pasien harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan dosis dan lama terapi yang dianjurkan. Hal ini akan membebani pasien JKN karena sebelumnya sudah membayar iuran setiap bulannya (Tannerl, Rantil, & Lolol, 2015).

Namun, hingga sekarang masih ada dokter yang menuliskan resep diluar Formularium. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kesesuaian peresepan obat pasien BPJS terhadap Formularium

Puskesmas pada kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian item obat dan kesesuaian resep peserta BPJS dengan Formularium Puskesmas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana gambaran kesesuaian peresepan obat pasien BPJS terhadap Formularium Puskesmas pada kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas Pemurus Baru pada Bulan Oktober – Desember Tahun 2019?

1.3 Tujuan LTA

Tujuan dari LTA ini adalah untuk mengetahui gambaran kesesuaian peresepan obat pasien BPJS terhadap Formularium Puskesmas pada kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas Pemurus Baru pada Bulan Oktober – Desember Tahun 2019.

1.4 Manfaat LTA

1.4.1 Bagi Puskesmas

Sebagai bahan masukan bagi dokter di Puskesmas mengenai penulisan resep yang sesuai dengan formularium. Serta sebagai tolak ukur standar pelayanan sehingga dapat memberikan gambaran pelayanan yang baik dari puskesmas untuk masyarakat.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang gambaran kepatuhan dokter di Puskesmas dalam menuliskan resep yang sesuai dengan Formularium Puskesmas.

1.4.3 Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang penerapan Formularium Puskesmas di Puskesmas serta sebagai sarana pengaplikasian dari mata kuliah Farmasi Rumah Sakit.